

KARAKTERISTIK PEMIMPIN NASIONAL IDEAL MENURUT PEMILIH PEMULA YOGYAKARTA

Ryan Sugiarto

Peneliti pada Click Survey Indonesia Yogyakarta

Email: ryansiip@yahoo.com.

Abstract

National leadership succession through general election is the foundational schema for the state management and change. The coming leadership hope bring good transformation. This research aimed to understand and analyzed how the characteristic of ideal national leader according to beginning voter in Yogyakarta. With using the survey there are 712 participant. Respondent consist of 352 male 360 female which distribute in all district at Yogyakarta province. With the sample error 3,6% and the trust level 95%. The sample take by multi stage random sampling, at 5 local district at Yogyakarta. Data take at September, 26 until October, 4 2013. Triangulation data be driven by interview. The result show that beginning voter at Yogyakarta aspire the idealistic national leader which is professional, from the cipil, youth leader and nationals.

Keyword: leader, criteria, beginning voter.

Abstrak

Suksesi kepemimpinan tingkat nasional melalui pemilu merupakan skema mendasar dalam perubahan arah dan tatakelola bernegara. Kepemimpinan mendatang diharapkan mampu membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana karakteristik pemimpin nasional ideal menurut pemilih pemula yogyakarta? Dengan menggunakan metode survey penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 712 responden, pemilih pemula pada pemilu 2014. Responden terdiri 352 responden laki-laki dan 360 responden perempuan, yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di propinsi Yogyakarta. Dengan sampling error 3,67% dan pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi stage random sampling, pada lima daerah tingkat dua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2013. Triangulasi dilakukan dengan wawancara kepada salah 3

responden. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilih pemula yogyakarta menginginkan idealisasi pemimpin nasional yang memiliki kriteria profesional, berasal dari kalangan sipil, tokoh muda dan nasionalis.

Kata Kunci: *pemimpin, kriteria, pemilih pemula.*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan politik merupakan isu yang terus berkembang seiring perkembangan negara dan bangsa. Pemimpin dan kepemimpinan serta politik dan negara-bangsa merupakan unsur fundamental bagi sebuah bangsa untuk menentukan arah dan gerak langkah dalam mengelola negara. Maka isu seputaran kepemimpinan menjadi isu yang tak pernah surut dalam dunia politik dan kebangsaan. Sistem demokrasi yang menjadi pilihan bernegara di Indonesia hingga saat ini belum melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai akar kebangsaan yang kuat, yang mampu memilih kepentingan rakyat dan bangsanya sebagai jalan penting dalam menjalankan kepemimpinannya. Mencari sosok pemimpin yang memiliki integritas intelektual dan etik-moral menjadi barang langka dan sukar untuk ditemukan. Karena selama beberapa dasawarsa ini setiap pemimpin Indonesia cenderung kolutif, nepotif, koruptif dan cenderung membangun rantai perkoncoan sejati dalam meraup kepentingan abadi.

Kepemimpinan Indonesia saat ini tengah ‘diamuk’ badai korupsi, tanpa kewibawaan. Hal ini mengakibatkan gerak pemerintahan tidak efektif dalam menuwujudkan cita-cita nasional. Demokrasi yang selama ini dijalankan masih sebatas demokrasi prosedural. Maka yang hari ini muncul ke permukaan dari para pemimpin negeri adalah persoalan-persoalan yang selalu terkait dengan pencitraan, kepentingan pribadi dan bagaimana membangun kelompoknya.

Dengan alasan tersebut banyak orang yang kemudian mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, baik dilevel daerah maupun nasional. Kebanyakan merasa mampu membenahi negeri dan lalu mencalonkan diri. Tetapi sebagian tidak mengukur seberapa *capable* dan seberapa

berkualitas para calon sebagai pemimpin yang dibutuhkan oleh negara dan rakyatnya. Pada titik inilah perebutan posisi pemimpin selalu terjadi dan diwarnai dengan kekerasan, uang dan kecurangan.

Memasuki lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, kepercayaan publik kian redup. Jajak pendapat triwulanan memperlihatkan, di antara empat bidang politik, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial, kinerja penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional dinilai publik mengecewakan.¹

Lebih lanjut, Kompas juga melaporkan bahwa secara keseluruhan kepuasan publik di bidang hukum 28,6 persen, naik tipis dibandingkan tiga bulan sebelumnya, 26,3 persen. Dari berbagai indikator bidang hukum, publik mengungkapkan kekecewaan tertinggi terhadap jaminan kepastian hukum. Hanya seperlima bagian publik (22,8 persen) yang menyatakan puas. Tiga dari empat orang juga mengaku tidak puas dengan penanganan kasus-kasus kriminalitas. Sementara pembenahan aparat pelayanan masyarakat relatif meningkat (43,2 persen) dan tertinggi dalam aspek penilaian bidang hukum.²

Maka sesungguhnya baik dan bijak untuk mendapatkan gambaran bagaimana karakter pemimpin yang diinginkan oleh rakyatnya. Keinginan rakyat terhadap karakter kepemimpinan ini penting agar pemimpin mendapatkan mandat dan legitimasi yang tinggi, sehingga mampu mengambil keputusan yang kuat tanpa tersandra oleh kepentingan-kepentingan partai politik pasca pemilu. Salah satu yang perlu dimintakan pendapatnya terhadap karakter kepemimpinan nasional adalah remaja pemilih pemula.

Dengan mendapatkan gambaran representasi harapan tentang karakteristik ideal pemimpin nasional, diharapkan pemilih pemula mampu dan mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu baik dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini penting

¹ Inggried Dwi Wedhaswary (ed), "Persepsi Terhadap Kinerja Pemerintahan SBY Jalan di Tempat", *Kompas*, 21 Oktober 2013, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 6.

agar angka partisipasi pemilih pemula dalam pemilu mengalami kemajuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana idealisasi pemimpin yang diinginkan dan diidamkan oleh pemilih pemula? Tujuannya adalah memberikan gambaran dan analisa yang komprehensif bagaimana karakter dan kriteria pemimpin yang akan dipilih oleh pemilih pemula dalam pemilu mendatang. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan gambaran, tidak saja pada pemilih pemula, atau masyarakat, tetapi juga partai politik dalam penentuan calon-calon pemimpin yang akan diajukan sebagai presiden atau kepala daerah. Dengan demikian partai politik, yang sesuai Undang-Undang Pemilu mempunyai mandat mengusulkan calon pemimpin nasional (presiden), mempunyai gambaran tentang kriteria pemimpin menurut pemilih pemula. Jika hal demikian bisa ditangkap, maka fungsi partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan negara bisa dilakukan, yaitu menampung dan meneruskan aspirasi warga negara dalam kebijakan dan keputusan negara.

B. Konsep Kepemimpinan dalam Politik

1. Suksesti Kepemimpinan Nasional

Suksesti presiden tahun 2014 menjadi penting bagi bangsa ini untuk memasuki era baru. Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi, yaitu membangun institusi demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah dalam beragam bidang kehidupan. Pada era baru, Indonesia mesti menjadi negara yang makin kuat, berdaulat dan bermartabat. Dalam konteks itu, Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Faktor kepemimpinan yang penting adalah memiliki wibawa moral yang ditopang dengan wawasan global dan mendasar apa saja yang menjadi tantangan utama bangsa ini, lalu memilih jajaran pembantunya yang berintegritas dan handal kemampuan teknokratiknya. Memimpin adalah menginspirasi. Memimpin adalah menggerakkan. Untuk itu, tanpa wibawa moral dan visi yang jelas,

sulit menggerakkan anak buah, terlebih lagi menginspirasi dan menggerakkan rakyat Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir paling tidak bisa diurai beberapa keberhasilan dan kegagalan dari seorang pemimpin, presiden Indonesia. Namun demikian justru pada akhir-akhir ini suara-suara ketidakpuasan, kekecewaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono makin kencang berhembus. Hal ini diwarnai oleh berbagai konflik kekerasan atas nama agama sebagaimana yang terjadi di Madura, berbagai kasus korupsi tidak hanya dikalangan eksekutif (kepala daerah hingga menteri), legislatif, bahkan lembaga yudikatif juga melakukan skandal 'mega' korupsi yang mencengangkan.

Kepemimpinan hasil demokrasi sekarang kalah jauh dengan karakter kepemimpinan pada era revolusi kemerdekaan. Dalam banyak kasus, pemimpin negeri ini tidak dapat menunjukkan kerja yang signifikan dalam mencapai cita-cita kebangsaan. Akhirnya, kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang mengakar pada masyarakat untuk sama-sama bergerak menjadi negara maju. Dalam sejarah pergerakan, banyak tokoh perubahan sosial yang telah lama meninggal, namun pengaruhnya masih bertahan, bahkan berkembang, karena kekuatan ide dan gagasannya serta keteladanannya dalam mencintai dan melayani rakyat yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Di era informasi ini, sosok seorang pemimpin yang sukses dan dicintai rakyatnya di sebuah negara akan mengundang simpati dan pengikut dari negara lain.

Sukses pemimpin nasional ini dilakukan dalam pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali. Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili aspirasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan Negara.³

Dalam banyak hal terkait politik, konflik mudah saja tersulut. Karakter kebangsaan Indonesia yang plural menyimpan potensi konflik yang besar pula. Kemajemukan Indonesia rentan terhadap konflik. Perbedaan suku, agama, ras dan ketimpangan kesejahteraan yang terjadi merupakan sumbu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kekerasan dan perpecahan dalam berbangsa. Konflik-konflik yang terjadi sangat mempengaruhi atau menghambat dan berhubungan dalam suksesi.⁴ Pengertian suksesi adalah proses seumur hidup dalam keseluruhan proses bernegara untuk mempersiapkan pengalihan kekuasaan dan control dari generasi ke generasi.⁵

Terlebih, tahun ini, 2014 adalah tahun politik. Suhu politik sedang tinggi. Masyarakat menghukum para pelaku korupsi dengan tidak memilih partai yang terasosiasi terhadap korupsi. Lagi-lagi, masyarakat juga sebetulnya telah menghukum pejabat pemerintahan yang kinerjanya kurang memuaskan, dengan menghindari parpol yang terasosiasi dengan pejabat tersebut. Naiknya suhu politik tidak serta-merta meningkatkan loyalitas terhadap parpol. Sangat mengherankan, *party id* (pemilih yang mengatakan dirinya dekat dengan parpol tertentu) malah masih di angka 20 persen. Artinya, pemilu 2014 sangat bernuansa individual dan dipengaruhi pemilih-pemilih bebas (*free voters*). Para pemilih bebas ini terbagi ke dalam blok yang puas dan tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berjalan, berikut kinerja

³ Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*” dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjaubi Demokrasi Kaum Pejabat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 56.

⁴ Susanto A.B., *The Jakarta Consulting Group on Family Business*, (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), hlm. 45.

⁵ Aronoff, *Business Succession: The Final Test of Greatness*. (London: Family Enterprise Publisher, 2003), hlm. 79.

parpolnya. Bahkan, lebih jauh, pemilih-pemilih bebas ini bisa disebut nonideologis.⁶

2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan selalu menarik untuk dibahas. Teori yang menelaah tentang diskursus ini juga terus berkembang dan berevolusi. Dimulai dari topik kepemimpinan yang dikarenakan sifat-sifat yang telah dimiliki sejak lahir, gaya-gaya kepemimpinan dan pembahasan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu, hingga ke pokok bahasan kepemimpinan yang dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan mampu membawa pengikutnya menghadapi perubahan dan berubah.⁷ Secara umum, disepakati bersama bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dapat menganalisa informasi secara mendalam untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, dia juga harus bisa melibatkan pihak-pihak yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat menciptakan situasi yang menginspirasi para pengikutnya. Tujuannya adalah mencapai kondisi yang lebih baik dan lebih tinggi lagi dari keadaan sekarang. Pada kenyataannya seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung-jawab, mau mengembangkan pengikutnya. Dan yang terpenting memiliki integritas dan etika yang baik, karena dia harus memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi pengikutnya.

Banyak pemikiran bermunculan mewarnai teori kepemimpinan dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangannya mulai dari *Great Man Theories*, *Trait Theories*, *Behaviourist Theories*, *Situational Leadership*, *Contingency Theory* dan *Transactional Theory* sampai dengan

⁶ Piliang, I.J, *Outlook politik 2014: riak-riak suksesi*. <http://koran-jakarta.com/?1609-outlook%20politik%202014%20riak-riak%20suksesi>. Koran Jakarta, diakses tanggal 24 Februari 2014, pukul 23.00 WIB.

⁷ Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. and Dennison, P., *A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks*, Centre for Leadership Studies, (UK: University of Exeter, 2003), hlm. 76.

Transformational Theory atau kepemimpinan transformasional.⁸ *Transformational theory* sebagai pendekatan yang paling terakhir berkembang, dimulai oleh James MacGregor Burns dengan bukunya, 'Leadership'. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional adalah suatu hubungan yang bersifat mutual dan menuju kearah peningkatan yang bisa merubah pengikut menjadi pemimpin dan dapat merubah pemimpin menjadi agen moral. Lebih lanjut Burns menyatakan kepemimpinan transformasional terjadi ketika satu orang atau lebih saling berinteraksi dimana ada saling mempengaruhi sehingga baik si pemimpin dan sang pengikut mencapai tingkat motivasi dan moral yang lebih tinggi.

Dalam sejarah kepemimpinan bangsa-bangsa, kita mengenal adanya perbedaan dan dikotomi antara kepemimpinan sipil dan kepemimpinan militer (Nix, 2012)⁹. Yang disebut pertama, kepemimpinan sipil adalah kepemimpinan yang kekuasaan tertinggi sebuah negara dipegang oleh kalangan sipil. Kepemimpinan ini adalah hasil dari sebuah pemilu yang demokratis. Sebagaimana inti dasar dari demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara yang demokratis adalah negara yang sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.

Kepemimpinan sipil mengedepankan pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan dan terbukanya peluang bagi semua warga negara untuk berperan dalam menentukan hidupnya sendiri. *Kedua* adalah, kepemimpinan militer. Kepemimpinan ini dipegang oleh kalangan militer (Huntington, 1991).¹⁰ Sifatnya adalah otoriter. Sistem komando menjadi bagian dari kepemimpinan militer, meskipun demikian dalam beberapa hal, kepemimpinan militer sering diasosiasikan sebagai kepemimpinan yang berwatak tegas, keras.

⁸ *Ibid*, hlm. 65.

⁹ D. Nix, "American Civil-Military Relation: Samuel P. Huntington and the Political Dimensions of Military Professionalism Naval War College Review", *Spring Journal*, Vol. 65, No. 2, hlm. 34. 2012

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35.

Sebagai contoh, Indonesia pada masa orde baru adalah contoh dari kepemimpinan militer-otoriter, dimana setiap pendapat yang berlawanan dengan penguasa dibungkam.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula dalam setiap even pemilu nasional ataupun pemilukada selalu didominasi kalangan pelajar atau siswa dan jumlahnya relatif besar. Jumlah yang besar, menjadikan pemilih pemula sering menjadi rebutan partai politik maupun para politisi untuk mendongkrak perolehan suara. Diperkirakan dalam setiap pemilu, jumlah pemilih pemula sekitar 20-30 persen dari keseluruhan jumlah pemilih dalam pemilu dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang berkompetisi. Para pemilih pemula biasanya antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena untuk pertama kali menggunakan hak pilih mereka. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 umumnya berusia 17 - 22 tahun. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya ada 18 juta pemilih pemula yang akan turut menyukseskan Pemilu 2014.¹¹

Menurut data BPS 2010, kelompok umur berusia 10-14 tahun 22.677.490 dan kelompok umur berusia 15-19 tahun 20.871.086. Jika diasumsikan kelompok umur 10-14 tahun separuh berusia 17 dan kelompok umur 15 -19 tahun semuanya menjadi pemilih, maka ada 32 juta jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Dan suara potensial ini sangat signifikan guna memenangkan perhelatan pemilihan umum mendatang.

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada

¹¹ Sinar Harapan (13 Januari 2014). *Peta pemilih Pemula Pemilu 2014*. <http://www.sinarharapan.co/news/read/30932/peta-pemilih-pemula-pemilu-2014>. Diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 13.00 WIB.

Pemilu. Suara potensial tersebut setidaknya bisa dilacak dari data dalam dua pemilu terakhir yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 juta pemilih pemula dari jumlah 147.219 juta jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62 persen) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan.

Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau calon legislatif (caleg) dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat atau caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya, dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari *political empowerment* bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014.¹²

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sementara pengambilan data kualitatif diperoleh lewat wawancara mendalam. Penelitian ini melibatkan 712 responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 352 responden

¹². M Rosit, *Melirik Potensi Pemilih Pemula pada pemilu 2014*. <http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014>. Diakses 24 Februari 2014 pukul 12.09 WIB.

laki-laki dan 360 responden perempuan, yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di propinsi Yogyakarta. Jika didetailkan lagi responden dalam penelitian ini terdistribusi dari 367 mahasiswa dan 345 responden dari kalangan pelajar di DIY. Dengan sampling error (SE) 3,67% dan pada tingkat kepercayaan 95 %.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *multi stage random sampling*, pada lima daerah tingkat dua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2013. Untuk menguatkan analisa peneliti menggunakan metode triangulasi penelitian dengan menggunakan model wawancara mendalam terhadap responden. Wawancara dilakukan kepada 3 orang responden kuantitatif dengan *purposive sampling*. Rentang waktu pengambilan data kualitatif berlangsung antara bulan Oktober hingga Desember 2013.

D. Idealisasi Kandidat Pemimpin Menurut Pemilih Pemula Yogyakarta

1. Profesional-Sipil

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klik Survey Indonesia (CSI) menunjukkan bahwa pemilih pemula di Yogyakarta memberikan kriteria pemimpin yang dikehendakinya. Dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada pemilih pemula menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memberikan pilihan dengan beberapa kriteria. Jawaban umum tersebut terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang, bagaimana kriteria dan idealisasi kandidat pemimpin menurut pemilih pemula.

Pertama, dari sisi latarbelakang kandidat. Hasil survey menunjukkan bahwa dari sisi latar belakang terdapat tiga besar pilihan. Tiga latarbelakang kandidat yang diinginkan pemilih pemula tersebut adalah profesional, aktifis pergerakan dan tokoh agama. Sebanyak 24,47% responden memilih kaum profesional untuk memimpin negeri, 20,57% aktifis pergerakan, 15,40% tokoh agama, 14,84%

pegiat organisasi. Lainnya berada di bawah angka itu. Detailnya sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Latar belakang kandidat pemimpin yang paling diinginkan
Pemilih Pemula Yogyakarta

Latar Belakang Kandidat	%
Profesional	24.47%
Aktivitas pergerakan	20.53%
Tokoh agama	15.40%
Pegiat organisasi	14.84%
Purnawirawan	8.51%
Pengurus partai	7.81%
Pengusaha	6.05%
Mantan pejabat	1.69%
Artis/model	0.70%
Total	100%

Pertanyaannya adalah kenapa karakteristik dari seorang profesional, aktifis pergerakan, dan tokoh agama menjadi pilihan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain? Padahal di Indonesia sebagian pemimpin nasional dan kepala daerah adalah dari kalangan partai politik.

Anggia (19 tahun) menuturkan pendapatnya bahwa kalangan professional lebih mementingkan kerja ketimbang kedudukan dan kekuasaan. Kalangan professional menurutnya adalah pemimpin yang mampu bekerja dan memahami mekanisme kerja kepemimpinan Indonesia.

*“Pemimpin profesionalkan lebih mementingkan kerja, dibandingkan politisi yang menjadi pemimpin. Para politisi hanya mencari kedudukan, dan ogah kerja. Bahkan mereka malah mengumpulkan dana untuk kepentingan partainya sendiri, bukan untuk rakyat”.*¹³

¹³ Wawancara dengan Anggia, 19 tahun, Mahasiswa, 10 oktober 2013.

Hal ini dikuatkan oleh Indra J. Piliang, peneliti dan politisi Partai Golkar dalam salah satu diskusi yang diselenggarakan di di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jumat (14/3/2014). Menurutny, Orang tidak ingin melihat politisi murni, tapi profesional punya pekerjaan misalnya bisa menulis, memimpin perusahaan, dosen tapi aktif di politik. Bukan politisi yang lahir sebagai politisi. Akan dihindari banyak orang.

Karakter profesional identik dengan kerja, sedangkan politisi identik dengan menduduki kekuasaan *nir* kerja. Sebagaimana yang disampaikan Anggia (19) perbedaan mendasar antara pemimpin dari kalangan profesional dan pemimpin dari kalangan politik adalah soal kemauan dan kemampuan dalam kerja. Dan sekali lagi karakter inilah yang dalam hasil survey dipilih oleh pemilih pemula dengan jumlah responden sebesar 24,47%.

Sedangkan ada sebanyak 20,53% pemilih pemula menginginkan pemimpin yang mempunyai pengalaman dan basic gerakan, atau aktifis gerakan. Aktifis gerakan oleh pemilih pemula dianggap mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin. Menurut Dewa Eko Budianto (19 tahun) aktifis gerakan mampu memahami keinginan dan berpikir tentang cita-cita kebangsaan, dan membangun kehidupan sosial yang pada beberapa hal tidak mampu dilakukan oleh negara. Lebih lanjut Dewa mengatakan, bahwa selama ini aktifis gerakan, terutama dari kaum mudalah yang memberikan dorongan perubahan dalam setiap pergeseran dan perubahan kebangsaan.

“Aktifis mampu memahami keinginan rakyat, mereka bekerja di akar rumput, sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik. Pengalaman diakar rumput inilah yang semestinya digunakan dalam pengambilan kebijakan jika ia adalah seorang pemimpin”.¹⁴

Penuturan Dewa sebagaimana tampak pada kutipan di atas rasanya mendapatkan pembetulan sejarah. Perubahan-perubahan dan gerak jaman Indonesia diinisiasi dan digerakkan oleh kaum muda yang notabenenya adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivisme

¹⁴ Wawancara dengan Dewa, 19 tahun, Mahasiswa, 3 Novemver 2013.

demokrasi. Perubahan besar-besaran yang paling akhir adalah reformasi 1998 yang dimotori oleh aktifis mahasiswa.

Hal lain yang menarik dari tabel 1 di atas adalah pengurus partai tidak begitu mendapatkan pilihan dari pemilih pemula. Hanya 7,81 % pemilih pemula yang menginginkan pemimpin dari partai politik. Pun demikian, hanya 1,69% dari responden yang menginginkan mantan pejabat untuk menjadi pemimpin. Sementara 0,70% dari remaja pemilih pemula yang menjadi responden dalam penelitian ini yang memberikan pilihan kepada artis atau model untuk menjadi kandidat pemimpin.

Penuturan Anggia (19) sebagaimana dikutipkan lagi di bawah ini, menunjukkan bahwa gambaran tentang politisi yang menjadi pemimpin memiliki gambaran yang tidak terlalu baik. Para politisi, menduduki kursi kepemimpinan hanya sebagai kekuasaan yang dinikmati oleh dirinya sendiri dan kelompok partai yang mengusungnya.

“Para politisi hanya mencari kedudukan, dan ogah kerja. Bahkan mereka malah mengumpulkan dana untuk kepentingan partainya sendiri, bukan untuk rakyat”.¹⁵

Dengan gambaran tersebut, linier dengan hasil survey yang menempatkan para politisi sebagai karakteristik pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula, 7,81 %.

Kedua, laterbelakang yang diinginkan oleh pemilih pemula Yogyakarta terhadap kandidat pemimpin nasional lainnya adalah kandidat yang berasal dari kalangan sipil. Sebanyak 65,03% pemilih pemula menentukan pilihan pemimpinnya berasal dari latar belakang sipil. Sisanya 34,97% responden memilih pemimpin yang berasal dari latar belakang militer. Publik lebih memilih sosok berlatar belakang sipil sebagai pemimpin nasional di masa datang. Karakter kepemimpinan yang egaliter, mementingkan dialog, berpihak pada

¹⁵ Wawancara dengan Anggia, 19 tahun, Mahasiswa, 1 Desember 2013.

kepentingan rakyat dan tegas menegakkan hukum paling diperlukan untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemilih pemula menginginkan agar tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia dipegang oleh pemimpin dari kalangan sipil. Dengan demikian kekuasaan berada ditangan orang sipil. Dalam hubungan sipil-militer, kekuasaan sipil artinya menempatkan tanggung jawab pembuat keputusan tertinggi strategis suatu negara berada pada tangan warga sipil pemimpin politik, bukan pada perwira militer. Samuel.P Huntington dalam bukunya *The Soldier and the State* memberikan penjelasan bahwa kekuasaan sipil yang ideal adalah pemberian kekuasaan secukupnya pada profesional militer yang kompeten pada kebijakan akhir yang ditentukan oleh penguasa sipil ((Nix, D.E, 2102).¹⁶

Hal ini penting agar proses demokrasi yang terbentuk di Indonesia semakin matang. Mengingat kekuasaan sipil adalah sebuah syarat yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah demokrasi liberal yang sangat baik. Ungkapan yang menarik untuk menjelaskan hubungan sipil-militer dalam perebutan kekuasaan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Mao Zedong, "Prinsip kita adalah partai memerintah senjata, dan senjata jangan pernah diizinkan memerintah partai". Hal ini sesungguhnya linear dengan ungkapan bahwa demokrasi adalah identik dengan pemerintahan yang dipegang oleh sipil, sehingga penguatan demokrasi adalah penguatan masyarakat sipil.

2. Tokoh Baru-Nasionalis

Karakter personal tokoh. Dari sisi karakter, didapatkan hasil penelitian bahwa kandidat pemimpin yang paling diinginkan oleh pemilih pemula di Yogyakarta bisa dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, baru-lama. Sebagian besar responden menginginkan kandidat dari wajah-wajah baru sebanyak 60,67%, sisanya 39, 33% masih menginginkan wajah-wajah lama dari ‘stok’ pemimpin yang ada

¹⁶ D. Nix, *American Civil-Military...*, hlm. 34.

di pentas nasional. Wajah-wajah lama yang dimaksud di sini adalah politikus-politikus atau pemimpin-pemimpin partai yang pernah atau sedang menjabat dalam posisi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini bisa disebut beberapa nama seperti, Wiranto, Prabowo, Megawati, Amin Rais dan Susilo Bambang Yudoyono.

Ketika dikonfirmasi dalam wawancara mendalam disebutkan bahwa wajah-wajah lama yang sudah atau sedang menjadi pemimpin nasional tidak membawa perubahan yang berarti bagi perbaikan bangsa dan Negara Indonesia. Sebaliknya pemilih pemula menginginkan generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membangun bangsa.

“Lha kae mas, nyatane tidak ada perubahan yang baik. Nek tipi-tipi itu banyak toh yang korupsi, banyak yang ketangkep KPK, banyak yang tidak akur”.¹⁷

Persoalan-persoalan kebangsaan sebagaimana disebutkan oleh Irma (18) memang menjadi pertimbangan bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihannya. Pilihan besar itu diajukan kepada tokoh-tokoh baru yang mempunyai citra dan kerja yang baik menurut media yang dicermati.

“Sebenarnya ada banyak tokoh baru yang baru-baru saja mencuatkan mas, ada pak Jokowi yang juga dari UGM, ada Pak Anis Baswedan, ada Chairul Tanjung, mereka punya track record yang bagus. Dan semestinya diberi kesempatan untuk menggantikan muka-muka lama dalam politik nasional”.¹⁸

Namun demikian, di level legislatif, tampaknya wajah-wajah lama masih mendominasi. Daftar calon sementara (DCS) calon caleg tampaknya belum terlalu mengalami perubahan yang berarti. Wajah-wajah lama masih bertengger di nomor urut pertama. Umumnya elite partai (pengurus partai) menempati nomor urut atas. Sayang, sebagian besar para calon/pemimpin berdomisili di Jakarta. Kaitan dengan

¹⁷ Wawancara dengan Irma Handayani, siswa SMA kelas xii, 18 tahun, 3 November 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Dewa, 19 tahun, Mahasiswa, 3 November 2013.

daerah pemilihan hanyalah kamuflase semata, sebatas tempat di mana seorang calon pernah dilahirkan. Secara artifisial, partai politik memandang latar belakang wilayah calon hanya sebatas “daerah kelahiran”, bukan sebagai wilayah kerja politik. Di level eksekutif, masih banyak wajah lama yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, dan Wiranto adalah nama-nama yang bisa disebut sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada pemilu 2014.

Kenyataan ini semakin memperkuat tesis purba filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, dalam *Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None* (1892) bahwa kekuasaan dan kekuatan adalah eksistensi hasrat manusia sebenarnya. Hasrat berkuasa (*the will to power*) bagi Nietzsche adalah cermin dari manusia bermental tuan (*ubermensch*) yang selalu ingin dilayani, bukan mentalitas budak yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani. Padahal, khitah demokrasi sejatinya menempatkan rakyat sebagai tuan.¹⁹

Tetapi, pemilih pemula yang menjadi responden dalam penelitian ini mulai menolak tokoh-tokoh lama. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemilih pemula sebagian besar menginginkan wajah baru, tokoh-tokoh baru dengan harapan mampu melahirkan perubahan baru kearah yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan oleh Dewa (19). Tren pilihan ini memberikan harapan agar penguasa politik bisa bergeser ke generasi muda yang mempunyai kompetensi dan terukur pengalamannya.

Kedua, Sisi Idiologis. Karakter yang diinginkan oleh pemilih pemula Yogyakarta menurut survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey CSI adalah tokoh nasionalis. Sebanyak 72,05% responden menginginkan pemimpin yang berkarakter nasionalis. Sisanya 27,95% pemilih pemula menginginkan tokoh pimpinan berkarakter religius.

Karakter nasionalis adalah karakter pemimpin yang mampu dan berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyatnya. Karakter ini mampu meredam tekanan-tekanan internasional, baik dalam

¹⁹ Wahyono J, *Etika dan Monopoli Politik Kuasa*, Koran Jakarta, 22 Februari 2014.

kepentingan politik, ekonomi, maupun hukum. Pengertian itulah yang dimaksud oleh Anggia (19), ketika ditanya oleh peneliti tentang bagaimana pemimpin yang nasionalis. Menurutnya, pemimpin yang nasionalis adalah pemimpin yang berani.

*“Pemimpin yang berani. Tidak takut pada bangsa asing, yang tidak seenaknya pada rakyat yang dipimpinnya”.*²⁰

Atau pendapat lain yang disampaikan oleh Irma (18), menunjukkan nasionalisme tidak selalu berkaitan dengan hubungan politik atau hubungan internasional dengan bangsa lain. Tetapi justru cara menghargai bangsanya sendiri.

*“Pemimpin yang berkarakter nasionalis menurutku yang menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya, produk Indonesia”.*²¹

Membangun dan membanggakan produk bangsa sendiri, bagi remaja pemilih pemula merupakan ciri bagi semua, terutama pemimpin, yang berkarakter nasionalis. Dan, pemimpin memegang tongkat kendali untuk menggerakkan produk dalam negeri sebagai cara untuk mencukupi kebutuhan bangsa sendiri. Oleh sebab membanjiri Indonesia dengan barang dan kebutuhan yang berasal dari luar adalah jalan menciptakan ketergantungan terhadap bangsa lain dan melemahkan sektor dalam negeri sendiri.

Ketiga, pemilih pemula mendambakan karakter pimpinan yang secara personal cerdas, tegas, sederhana dan religius. Komposisi karakter tersebut, merupakan kebutuhan pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia yang majemuk. Berikut ini tabel pilihan pemilih pemula terhadap karakter personal kandidat pemimpin nasional

²⁰ Wawancara dengan Anggia, 19 tahun, Mahasiswa, 3 Novemver 2013.

²¹ Wawancara dengan Irma Handayani, siswa SMA kelas xiii, 18 tahun, 3 Novemver 2013.

Tabel 2. Karakter Personal Kandidat Pemimpin Nasional yang diinginkan
Pemilih Pemula Yogyakarta

Karakter	%
Cerdas	31.36%
Tegas	25.51%
Sederhana	18.53%
Religius	13.32%
Lainnya	11.28%
Total	100.00%

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin yang diinginkan oleh pemilih pemula yang menjadi responden penelitian survey ini, atau remaja pada umumnya, harus memiliki kriteria cerdas, sederhana, tegas, religius, dan cerdas. Urutan pertama dari hasil survey ini kriteria pemimpin harus cerdas, kriteria ini dipilih oleh 31,36% responden, diikuti kemudian seorang pemimpin harus tegas, yang dipilih oleh 25,51% responden, kemudian sederhana, 18,53% dan menyusul seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang religius sebanyak 13,32% responden. Sisanya 11,28 % memberikan kriteria lain.

Pemimpin cerdas tidak asal membuat keputusan dan tidak asal bertindak. Tapi, ia akan mempelajari setiap hal secara detail dan rinci agar tindakannya tidak menciptakan kesalahpahaman. Pemimpin cerdas adalah seorang pemimpin cerdas yang tahu cara-cara terbaik dalam memformulasikan setiap persoalan bangsa sebelum bertindak. Ia selalu berpikir untuk kepentingan semua pihak dan tidak sekedar menghibur hati sekelompok orang dengan keputusan dan tindakan yang kurang jelas.

*“Bangsa ini harus dipimpin oleh presiden yang cerdas, tidak mudah ragu, kecerdasan itu menuntunnya untuk mengambil keputusan yang solutif. Tidak membuat gamang rakyatnya sendiri”.*²²

Kemampuan untuk memberikan informasi dengan cermat, tepat dan jelas dan juga kemampuan untuk menerima informasi dari luar dengan kepekaan tinggi, merupakan syarat mutlak bagi pemimpin yang efektif. Pemimpin tersebut harus mampu menjabarkan “*bahasa policy*” ke dalam “*bahasa operasional*” yang jelas dan singkat.

Selain cerdas, menjadi pemimpin di Indonesia haruslah yang tegas. Ketegasan diperlukan ditengah persoalan-persoalan yang membelit Indonesia, baik dari sisi kuktural maupun hukum. Hal ini sama seperti sampaikan Yulianti (18 tahun), siswa SMA 1 Yogyakarta.

*“Yo kudu sing tegas, biar soal-soal yang bikin kisruh di masyarakat bisa diatasi dengan cepet. Kalau pemimpinnya tidak tegas, ya rakyat bisa sak penake”.*²³

Mengelola masyarakat yang multi etnis dalam rentang geografis yang luas seperti Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang tegas. Beberapa konflik horizontal yang terjadi atas nama agama yang belakangan terjadi tidak menemukan solusi yang baik, oleh sebab tidak ada ketegasan dari presiden sebagai kepala Negara. Sebagai contoh, bisa disebut di sini, pengusiran warga syiah di Madura oleh warga lain yang berbeda pandangan hingga kini belum menemukan solusinya. Akibatnya konflik-konflik serupa bisa terjadi di daerah lain. Masyarakat bertindak sendiri mengatasnamakan kelompok dan agama mayoritasnya. Maka dititik ini kepemimpinan yang tegas, yang berdiri pada semua kepentingan kelompok di idamkan oleh pemilih pemula di Yogyakarta.

Karakteristik personal yang ketiga adalah sederhana. Praktik kesederhanaan pemimpin negeri ini pernah dicontohkan oleh pemimpin pada masa awal republik. Pelantikan Presiden pertama Indonesia menjadi contoh kesederhanaan seorang pemimpinnegera.

²² Wawancara dengan Dewa, 19 tahun, Mahasiswa, 3 Novemver 2013.

²³ Wawancara dengan Yulianti, 18 tahun, SMA kelas xiii, 3 Novemver 2013.

Soekarno, merayakan pelantikannya sebagai presiden pertama Republik Indonesia hanya dengan makan lima puluh tusuk sate ayam. “Kumakan sateku dengan lahap dan inilah seluruh pesta pengangkatanku sebagai kepala negara,” kenang Bung Karno dalam buku otobiografi, *Soekarno Penyambung Lidah Rakyat*. Namun demikian kesederhanaan pemimpin-pemimpin awal kemerdekaan tidak menyurutkan mereka untuk memberikan seluruh kemampuannya untuk memimpin Negara. “Tak ada yang lebih baik kecuali kesederhanaan,” ungkap Tao, ahli filsafat China yang mengajarkan nilai-nilai kebijakan hidup itu ribuan tahun silam. Kesederhanaan mengandung makna “hidup sesuai kebutuhan dan mencapai sesuai kemampuan”.

Tepat di sini sesungguhnya pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang menyadari dan mengetahui bahwa kedudukan sebagai pemimpin bukanlah miliknya. Kepemimpinannya adalah cara untuk menyejahterakan orang lain. Dengan demikian pemimpin tidak mendaku kepemimpinannya. Ki Ageng Suryomentaram, salah satu pangeran Keraton Yogyakarta, putra dari HB VII pernah mengatakan dengan indah hal ini “Yang menangis adalah yang berpunya. Yang berpunya adalah yang kehilangan. Yang kehilangan adalah mereka yang ingin”. Maka pemimpin adalah ia yang diajukan oleh rakyat, bukan orang yang menginginkannya.

Kriteria personal *keempat*, karakteristik pemimpin nasional harus religius. Kepemimpinan religius dibutuhkan oleh negara dan rakyat agar memiliki pembawaan bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah. Dengan begitu diharapkan kepemimpinan terhindar dari bentuk-bentuk penyalahgunaan dan korupsi. Kesadaran terhadap religiusitas pemimpin menjadi bekal agar amanah yang dipercayakan rakyat atas keterpilihannya dalam pemilu mampu dibuktikan.

Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dari sisi latarbelakang dan kriteria personal, menunjukkan bahwa sesungguhnya pemilih pemula juga mengikuti perkembangan kepemimpinan nasional. Penyalahgunaan-penyalahgunaan wewenang

kepemimpinan yang berakibat banyak kasus hukum terkait dengan korupsi, menjadi bahan evaluasi bagi karakteristik pemimpin menurut pemilih pemula.

“Buktinya kan KPK banyak menangkap tokoh-tokoh pemimpin sekarang. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita memang perlu pemimpin yang segar, yang muda, yang tidak terkena virus-virus pemimpin yang telah korupsi sebelumnya”.²⁴

Sebagaimana yang dilontarkan Anggita (19) di atas, pemilu 2014 kali ini membutuhkan penyegaran kepemimpinan. Tokoh-tokoh lama tidak menarik kembali bagi pemilih pemula. Kalangan professional menjadi lumbung yang diinginkan oleh remaja pemilih pemula. Kalangan muda juga diinginkan pemilih pemula karena gambaran bahwa kalangan muda bisa keluar dan tidak terpengaruh dengan gaya pemimpin-pemimpin tua yang telah banyak memegang kuasa namun tidak menghasilkan apapun. Bahkan kaum tua, telah banyak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan negaranya dengan tindak korupsi.

3. Pemimpin Pilihan Pemilih Pemula

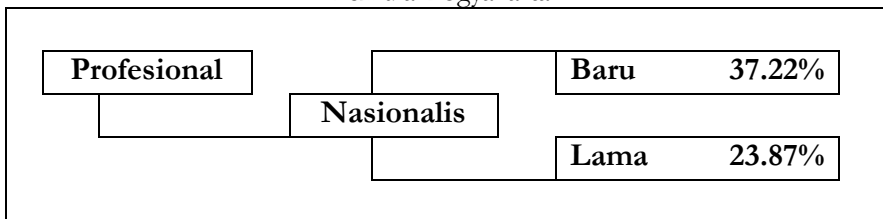
Dari beberapa karakter dan idealisasi pemimpin yang diinginkan oleh pemilih pemula dapat diberikan beberapa ilustrasi tentang idealisasi kandidat. Dengan melakukan persilangan data (*crossstabulasi* data), peneliti mencoba menganalisa idealisasi karakter seperti apa yang diinginkan oleh pemilih pemula Yogyakarta. Kombinasi atau persilangan antar karakter ini dilakukan untuk melihat unsur-unsur kriteria seperti apa yang paling diinginkan dari seorang pemimpin oleh remaja.

Dari persilangan kriteria didapatkan komposisi kriteria pemimpin nasional yang paling diminati oleh pemilih pemula Yogyakarta. Peneliti mengetengahkan kombinasi yang paling banyak diminati. Dua

²⁴ Wawancara dengan Anggita, 19 tahun, Mahasiswa, 3 November 2013.

gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana kombinasi kriteria dan karakter pemimpin yang diinginkan remaja.

Grafik 1. Persilangan kriteria Idealisasi pemimpin menurut pemilih Pemula Yogyakarta



Dari Grafik 1 di atas dapat dibaca bahwa kombinasi antara kriteria profesional-nasionalis-dan tokoh muda berada diangka 37.22% mengalahkan kombinasi profesional-nasionalis-dan tokoh lama yang berada pada angka 23.87%. Karakteristik kunci pada grafik di atas adalah umur kandidat. Pemilih pemula, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelum ini, lebih memilih tokoh-tokoh baru (muda) tinimbang tokoh lama (tua) yang pernah mengikuti kontestasi sebelumnya. Kombinasi pada grafik pertama tampaknya lebih cemerlang dibandingkan kombinasi pada karakter (grafik) kedua yang akan dibahas di bawah nanti. Profesional-Nasionalis-Muda, tampaknya menjadi kombinasi yang sesuai dengan karakter bangsa, jika ingin menggunakan momentum perubahan ini menjadi berarti. Sebaliknya, unsur orang tua (tokoh lama) sebagai kandidat pemimpin tidak menarik bagi pemilih pemula. Pun demikian, tokoh tua sudah selayaknya diistirahatkan, agar negara bisa berlari lebih kencang. Namun demikian, pada Grafik 1. Kombinasi profesional-nasionalis-muda dan profesional-nasionalis-lama, tingkat keeterpilihannya masih berada di atas 20%.

Karakter profesional-nasionalis-muda, diharapkan mampu membawa perubahan. Tokoh-tokoh muda-profesional-dan mempunyai jiwa nasionalis, tampaknya mulai banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Karakter kepemimpinan sebagaimana yang ada pada Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri

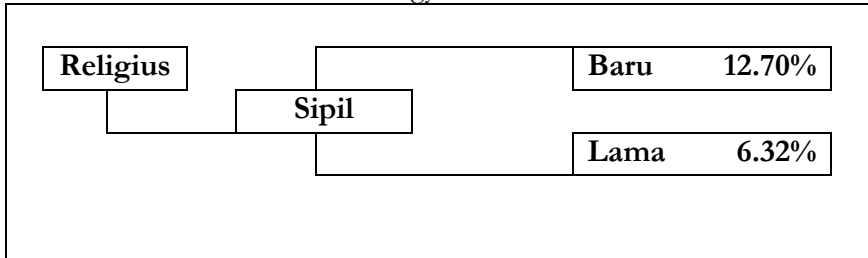
Rismaharani, dan duet Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Cahaya Purnama (Ahok) terbukti mampu memberikan perubahan-perubahan dari hasil kerja nyata. Mereka, pemimpin tiga daerah ini, memposisikan dirinya sebagai pelayan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi warganya. Mereka inilah yang memiliki cirri *servant leader*.

Wong dan Davey (2007)²⁵ menyatakan bahwa salah satu profil servant leader adalah melihat dirinya sendiri sebagai *servant* yang memberikan layanan dan memudahkan warga dalam urusan dengan negara. Salah satu sifat servant adalah *cultivating stewardship*, artinya *servant leader* mempercayai bahwa dirinya bertanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat yang telah memilihnya.

Selanjutnya, pada Grafik 2 di bawah ini menunjukkan bahwa kombinasi religius-sipil-baru berada pada angka 12,70% sedang religius-sipil-lama pada angka 6,32%. Dua kombinasi ini masih kalah jauh dengan dua kombinasi sebagaimana terlihat pada Grafik 1. Karakter tokoh yang religius tampaknya menjadi kendala bagi pemilih pemula untuk menjatuhkan pilihannya. Jika hasil survey dipisah-pisah remaja pemilih pemula menempatkan pilihannya dari latarbelakang kalangan sipil 65,03%, sisanya 34,97% menjatuhkan pilihan idealisasi dari kalangan militer. Namun demikian persilangan data antara sipil-religius-dan baru tidak mampu mengerek pada angka yang lebih tinggi. Bahkan jauh lebih turun ketika tokoh dari latarbelakang sipil memiliki karakter religius dan tokoh lama, yaitu pada angka di bawah 10 %, atau tepatnya pada angka 6,32%.

²⁵ P.T. Wong, dan D. Davey, *Best Practice in Servant Leadership*. http://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2007/wong-davey.pdf. Diakses 24 Februari 2014 pukul 23.05 WIB.

Grafik 2. Persilangan kriteria idealisasi pemimpin menurut pemilih pemula Yogyakarta



Dua grafik sebagaimana sudah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pemilih pemula cenderung memberikan idealisasi bagi pemimpin dengan karakter yang professional-nasionalis-muda. Tiga kombinasi karakter ini memungkinkan bergulirnya perubahan. Tentu saja dengan dukungan dan legitimasi yang kuat dalam pemilu. Karakter yang kuat semacam ini memberikan harapan kepada rakyat dan bangsa terhadap arah masa depan yang lebih baik. Dan karakter itulah yang diinginkan oleh rakyat, terutama dalam hal ini adalah pemilih pemula Yogyakarta yang menjadi area survey ini.

Faktor religius tampaknya tidak mampu menjadi faktor besar bagi calon pemimpin yang diinginkan oleh pemilih pemula. Beberapa tokoh politik yang berasal dari partai yang berbasis agama, yang terjerat kasus korupsi menjadi salah satu alasan kenapa faktor religius tidak menjadi kriteria kemenangan.

“Itu, tokoh-tokoh politik dari partai yang katanya religius malah melakukan korupsi. Nilainya tak tanggung-tanggung? Jangan-jangan agama hanya menjadi kedok untuk berbuat jahat terhadap rakyat”.²⁶

Sejalan dengan hal itu sesungguhnya, selaras dengan apa yang di tuliskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa pemimpin yang diinginkan adalah yang kuat karakternya, yang tidak *ambivalen* dan tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan. Pemimpin yang tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Pemimpin yang

²⁶ Wawancara dengan Anggita, 19 tahun, Mahasiswa, 3 November 2013.

berkuasa tetapi tidak menguasai. Kaya tetapi tidak memiliki. Cerdas tetapi menyembunyikan kecerdasannya. Jujur tetapi rendah hati. Berbicara melalui kerja. Termasyhur tetapi berlaku biasa. Berprinsip tetapi terbuka. Menghukum dengan menangis. Berdoa bukan untuk dirinya.²⁷

Maka di tengah meluasnya ketidakpercayaan publik pada politik, diperlukan kepemimpinan moral yang dapat menggairahkan kembali sendi-sendi berbangsa yang limbung oleh berbagai kasus kekerasan, korupsi dan bentuk pengingkaran masyarakat lainnya. Tentang tipe kepemimpinan yang ideal, rasanya perlu mengingat kembali ujaran-ujaran lama yang hingga kini masih relevan untuk digunakan. Adalah Khalifah Umar pernah memberikan petunjuk tentang idealisasi seorang pemimpin, “Yang mampu memangku kepemimpinan ini adalah orang yang tegas tapi tak sewenang-wenang, lembut tapi tidak lemah, murah hati tapi tidak boros, hemat tapi tak kikir. Hanya orang seperti itulah yang mampu.”²⁸

Dengan memperhatikan harapan dan idealisasi dari publik dan berbagai teori, ajaran dan norma tampaknya menjadi hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja dalam memilih pemimpin nasional yang kuat. Penelitian ini paling tidak menunjukkan bagaimana preferensi remaja, sebagai pemilih pemula, dalam memandang dan menginginkan calon pemimpinnya.

Selain hasil survey sebagaimana sudah dipaparkan di atas, wacana kepemimpinan baru mendatang bukan hanya pemimpin yang berkarateristik seperti diinginkan oleh para rakyat, tetapi pemimpin yang memiliki beberapa karakteristik yang mampu membawa arah gerak Indonesia menjadi negara maju. Beberapa karakteristik yang semestinya dimiliki oleh pemimpin adalah: *Pertama, The meaning of direction* (memberikan visi, arah, dan tujuan). Seorang pemimpin yang efektif membawa kedalaman (*passion*), perspektif, dan arti dalam

²⁷ Sri Sultan HB X, *Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu Membangkitkan Martabat Bangsa*. Makalah tidak diterbitkan. hlm. 2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

proses menentukan maksud dan tujuan dari kepemimpinannya. Setiap pemimpin yang efektif adalah menghayati apa yang dilakukannya. Waktu dan upaya yang dicurahkan untuk bekerja menuntut komitmen dan penghayatan.

Kedua, *Trust in and from the Leader* (menimbulkan kepercayaan). Keterbukaan merupakan komponen penting dari kepercayaan. Saat kita jujur mengenai keterbatasan pengetahuan yang tidak ada seluruh jawabannya, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan dari orang lain. Seorang pemimpin yang menciptakan iklim keterbukaan dalam kepemimpinannya adalah pemimpin yang mampu menghilangkan penghalang berupa kecemasan yang menyebabkan masyarakat yang dipimpinnya menyimpan sesuatu yang buruk atas kepemimpinannya. Bila pemimpin membagi informasi mengenai apa yang menjadi kebijakannya, pemimpin tersebut memberlakukan keterbukaan sebagai salah satu tolok ukur dari “performance” kepemimpinannya.

Ketiga, memiliki dan menghidupi harapan. Harapan merupakan kombinasi dari penentuan pencapaian tujuan dan kemampuan mengartikan apa yang harus dilakukan. Seorang pemimpin yang penuh harapan menggambarkan dirinya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini: saya dapat memikirkan cara untuk keluar dari kemacetan, saya dapat mencapai tujuan saya secara energik, pengalaman saya telah menyiapkan saya di masa depan, selalu ada jalan dalam setiap masalah. Pemimpin yang mengharapakan kesuksesan, selalu mengantisipasi hasil yang positif.

Keempat, berorientasi pada hasil. Memberikan hasil melalui tindakan, risiko, keingintahuan, dan keberanian. Pemimpin masa depan adalah pemimpin yang berorientasi pada hasil, melihat dirinya sebagai katalis –yang berharap mendapatkan hasil besar, tapi menyadari dapat melakukan sedikit saja jika tanpa usaha dari orang lain. Pemimpin yang seperti ini membawa antusiasme, sumber daya, toleransi terhadap risiko, disiplin dari seorang “entrepreneur”.

Tetapi apapun itu yang terpenting adalah bahwa pemimpin nasional haruslah orang yang mau berusaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945: membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

G. Penutup

Melalui pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula Yogyakarta menginginkan pemimpin ditingkat nasional dengan beberapa karakter, yaitu tokoh yang berlatar belakang profesional, sipil, muda, dan nasionalis. Dari sisi personal pemilih pemula juga mengidealisasikan pemimpin yang memiliki karakter yang cerdas, tegas, sederhana. Kombinasi ini tampaknya akan membuat pemilih pemula, yang konon apatis terhadap pemilu, mampu menggerakkan keinginannya untuk berperan aktif dengan memberikan suara politiknya, turut serta melakukan perubahan mendasar dari bangsa ini. Perubahan mendasar itu hanya bisa dilakukan dalam pemilu dengan cara memilih pemimpin yang diinginkan bersama, yang memiliki karakter yang kuat.

Penelitian ini telah memaparkan karakter, kriteria atau idealisasi kandidat pemimpin yang layak dipilih dalam pemilu mendatang. Paling tidak ini menurut pemilih pemula di Yogyakarta. Maka tugas publik selanjutnya adalah mencermati dan menimang, mana di antara tokoh-tokoh yang mewarnai publik saat ini yang memiliki kriteria idealisasi pemimpin nasional tersebut, profesional, sipil, muda dan nasionalis.

Daftar Pustaka

- Aronoff. 2003. *Business Succession: The Final Test of Greatness*. Family Enterprise Publisher.
- Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. and Dennison, P. 2003. *A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks*. Centre for Leadership Studies, University of Exeter. UK.
- Nix, D. 2012. "American Civil-Military Relation: Samuel P. Huntington and the Political Dimensions of Military Professionalism Naval War College Review", *Spring Journal*, 2012, Vol. 65, No. 2.
- Piliang, I.J. 2014. *Outlook Politik 2014: Riak-Riak Sukses*. Koran Jakarta, diunduh tanggal 24februari <http://koran-jakarta.com/?1609-outlook%20politik%202014%20riak-riak%20sukses>. Diakses 24 Februari 2014 Pukul 15.09 WIB
- Reynolds, Andrew. 2001. *Merancang Sistem Pemilihan Umum*", dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjabat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Rosit, M. 2014. Melirik Potensi Pemilih Pemula pada pemilu 2014. <http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014>. Diakses 24 februari 2014 pukul 23.05 WIB.
- Sinar Harapan. *Peta pemilih Pemula Pemilu 2014*. <http://www.sinarharapan.co/news/read/30932/peta-pemilih-pemula-pemilu-2014>. Diakses 13 Januari 2014 pukul 13.00 WIB.
- Sultan, Sri HB X. 2003. *Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu Membangkitkan Martabat Bangsa*. (Makalah tidak diterbitkan).
- Susanto, A.B. 2007. *The Jakarta Consulting Group on Family Business*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Wahyono, J. 2014. Etika dan Monopoli Politik Kuasa, *Koran Jakarta*, 22 Februari 2014

Wong, P.T., & Davey, D. 2007. Best practice in servant leadership. http://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2007/wong-davey.pdf. Diakses 24 Februari 2014 pukul 12.05 WIB.